

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional mencakup seluruh hubungan yang dilakukan baik negara maupun non-negara yang melewati batas yuridis masing-masing negara serta menjadi langkah diplomasi oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Hubungan internasional mempelajari seluruh dimensi dan aspek serta mempelajari sebuah hubungan batas negara seperti ekonomi, politik, keamanan, budaya. Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari hubungan dan interaksi antar negara, termasuk aktifitas dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, *non-governmental organizations* (NGOs) dan *multinational corporations* (MNCs). (Jackson & Moller, 2019:4). Menurut Andrias D, hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok – kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan – kekuatan, dan tekanan – tekanan, proses – proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir dari manusia (Darmayadi, 2015:23).

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara yang berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non-negara (*non*

*states actor*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.

Pada abad ke-19, Hubungan Internasional hanya berfokus kepada pada aktor negara saja. Dalam perkembangannya, Hubungan Internasional tidak berfokus kepada aktor negara saja, tetapi juga kepada non-aktor seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional ataupun individu yang berpengaruh. Aktor *state* (negara) menganut sifat dan fungsi negara dalam berperan sebagai aktor Hubungan Internasional. Menurut pemikiran kaum realis, sifat negara terbagi 3 yaitu:

1. *Statisme*, sifat ini merupakan hasil pandangan kaum realis yang menyatakan bahwa sifat dasar negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam sifat ini juga bermaksud bahwa sifat negara tidak akan pernah berubah sama sekali. Selain itu, menyatakan bahwa hubungan antar negara hanya dapat dilihat melalui kekuasaan.
2. *Survival*, dalam sifat survival dijelaskan bahwa negara harus menggunakan *power* atau kekuatan yang besar untuk pertahanan negaranya juga digunakan untuk mencapai tujuan dari kepentingan negara tersebut.
3. *Self-help*, sifat ini ialah sifat untuk tidak perlu bergantung pada negara lain karena tidak selamanya dapat dibantu oleh negara lain dan tidak adanya jaminan dari negara lain atas keselamatan negara itu sendiri.

Aktor *non-state* yang didalamnya terbagi atas beberapa aktor yaitu, IGO (*International Government Organization*), NGO (*Non-Government Organization*), MNC (*Multi National Corporation*), dan terakhir individu.

Aktor *non-state* muncul setelah adanya pemikiran bahwa sistem *nation state* yang sebelumnya menjadi aktor dalam Hubungan Internasional dianggap tidak berjalan secara efisien karena tidak selamanya negara dapat menyelesaikan berbagai urusan. Adapun aktor *non-state* diantaranya yaitu:

- IGO (*International Government Organization*). Dalam IGO pemerintahan suatu negara yang berperan dalam organisasi internasional.
- NGO (*Non-Government Organization*). Hampir semua dari NGO adalah organisasi-organisasi *non-profit* atau organisasi yang tidak mencari keuntungan dan juga organisasi sosial (sukarela). Tujuan NGO adalah memperjuangkan HAM dan menjalankan kegiatan sosial. NGO juga membahas isu-isu global dan masalah sosial.
- MNC (*Multi National Corporation*). Aktor ini mencari keuntungan dan mempunyai *power* untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan suatu negara.
- Aktor individu adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam dunia internasional.

K.J. Holsti dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis*, menyatakan bahwa

“Hubungan internasional mengkaji kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh berbagai negara di dunia yang apabila terjadi ketidaksesuaian maka akan melahirkan konflik. Hubungan

internasional juga mencakup hubungan yang bersifat konflik.” (Rizki & Teguh, 2015:2).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku Pengantar Studi Hubungan Internasional, mengatakan bahwa:

“Alasan utama mengapa harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global” (2005:3).

Hubungan Internasional selalu mengalami fenomena yang berubah dari waktu ke waktu dan munculnya berbagai isu – isu yang baru. Hubungan antara Rusia dan Ukraina dulu dapat dikatakan baik melihat dari sejarah bahwa Ukraina merupakan wilayah pecahat Uni Soviet. Akan tetapi, hubungan tersebut semakin lama semakin buruk sehingga memicu adanya konflik dan menarik perhatian negara – negara Eropa dan negara – negara Barat. Bukan hanya negara saja, Ukraina pun berniat untuk meminta bantuan organisasi internasional yaitu NATO dan Uni Eropa.

### **2.1.2 Keamanan**

Secara etimologis konsep keamanan atau *security* berasal dari Bahasa latin “*securus*” (*se + cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya,

terbebas dari ketakutan. Pendekatan tradisional yang didominasi oleh Realisme menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu bangsa untuk melindungi negaranya dari serangan militer negara lain (Perwita, 2008:6).

Keamanan didefinisikan sebagai kemampuan bertahan diri dari ancaman yang nyata. Isu keamanan internasional senantiasa meramaikan Kajian Hubungan Internasional. Sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan dalam Kajian Keamanan Internasional mengalami perkembangan melalui perdebatan-perdebatan, dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) sampai non-tradisional (manusiawi dan alternatif). Teks-teks keamanan tradisional yang berlaku pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dengan batasan keamanan yang memfokuskan pada negara sebagai aktor kunci keamanan (*pivotal player*), sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan, mengalami anomali (*changes and challenges*).

Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear* mengatakan bahwa “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*” (Buzan, 2008:36). Menurut Barry Buzan, makna konsep keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara saja melainkan meliputi aspek-aspek non-militer dan non-aktor. Dalam bukunya yang berjudul “*People, States and Fear*”, Buzan membagi keamanan kedalam 5 (lima) bidang yaitu militer, lingkungan, politik,

ekonomi, dan *societal*. Aspek militer hanya salah satu aspek penting dalam dimensi keamanan, akan tetapi juga lebih kepada *peace and security*. Dimensi keamanan ada perubahan yang dipahami sifatnya secara multidimensional dan bagaimana menjaga suatu negara dan individu yang ada didalamnya.

Menurut John H. Herz dalam bukunya yang berjudul *Political Realism and Political Idealism* menyatakan bahwa dalam konsep keamanan terdapat kondisi suatu negara yang meningkatkan pertahanan dan keamanan guna untuk menghindari ancaman dari luar yang menyebabkan negara – negara sekitarnya merasa terancam dan melakukan tindakan yang serupa, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan ketegangan bahkan memicu konflik yang disebut dengan dilema keamanan.

Suatu negara menganggap bahwa upaya yang dilakukannya yaitu bersifat *defense* yaitu usaha untuk mengurangi kemampuan lawan untuk menguasai sesuatu dari pihak negara tersebut dengan tujuan untuk melawan pihak yang menyerang guna meminimalisir kerugian apabila upaya *deterrence* gagal. *Deterrence* merupakan tindakan ancaman militer terhadap pihak lain dengan maksud untuk mencegah agar pihak lain tidak melakukan tindakan agresif atau melakukan serangan militer. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena sulitnya membangun kepercayaan antar negara, kegagalan dalam membangun komunikasi, faktor sejarah. Pada akhirnya akan berdampak dengan adanya persaingan antar-

negara untuk meningkatkan keamanan masing – masing, membentuk aliansi, memicu ketegangan dalam situasi internasional, perlombaan senjata, berpotensi terhadap timbulnya perang.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II tatanan global mengalami perubahan. Sehingga konsep keamanan semakin berkembang dengan munculnya isu – isu non-tradisional seperti terorisme, *cyber*, kemanusiaan, lingkungan hidup yang dimana membawa dampak negatif terhadap tatanan dunia secara global. Selain itu, aktor yang terlibat tidak hanya negara saja tetapi aktor non-statet seperti organisasi kejahatan transnasional ataupun individu yang melakukan tindak kejahatan dan mengganggu stabilitas suatu negara atau bahkan secara global. Konsep keamanan baru yang diperdebatkan adalah:

- Keamanan Bersama (*Common security*).

Diperkenalkan oleh komisi Palme (*The Palme Coomission*) pada tahun 1980-1981. Keamanan ini berbicara bahwa mereka percaya hubungan antar aktor yang saling bermusuhan bisa dirubah dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa saling curiga akan maksud pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata.

- Keamanan Komprehensif (*Comprehensive security*).

Keamanan ini meliputi semua aspek kehidupan manusia, negara wajib memberikan perlindungan keamanan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup diluar keamanan militer secara fisik bagi setiap warga

negaranya. Dari keamanan ini, melahirkan konsep keamanan manusia (*human security*)

- Keamanan Kooperatif (*Cooperative security*).

Bentuk kerjasama keamanan yang paling longgar. Memanfaatkan semua saluran yang mengacu kepada semua aspek keamanan. Bentuk-bentuk kerjasama yang *soft* (tranparansi, normatif, dan tidak punya kekuatan untuk implementasi).

Dengan semakin banyaknya isu – isu yang berkembang dalam Hubungan Internasional, keamanan tidak terfokus kepada kekuatan militer saja tetapi juga dapat berkaitan dengan ekonomi internasional, organisasi internasional, hukum internasional (Burhanuddin, 2017:6). Kemudian, UNDP (*United Nations Development Programme*) mengidentifikasi 7 (tujuh) kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius, diantaranya:

1. Keamanan Ekonomi.
2. Keamanan Pangan.
3. Keamanan Kesehatan.
4. Keamanan Lingkungan Hidup.
5. Keamanan Pribadi.
6. Keamanan Komunitas.
7. Keamanan Politik. (United Nations Development Programme, Human Development Report 1994)

Keamanan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dipenuhi oleh negara karena menyangkut kepada rasa aman dari masyarakatnya itu



sendiri. Sehingga, suatu negara dapat terbebas dari ancaman baik dari internal negara itu sendiri ataupun eksternal.

Dalam penggunaan strategi *hybrid warfare* yang digunakan oleh Rusia ke Ukraina, telah mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri Ukraina. Dimana politik dalam negeri tidak stabil dan adanya pihak oposisi yang pro-Rusia muncul didalam wilayah Ukraina.

### **2.1.3 Konflik**

Konflik berasal dari Bahasa latin “*conflictus*” yang artinya pertentangan atau perkelahian. Dalam pemenuhan kepentingan dan tujuan negara yang dimana adanya interaksi antar negara dapat mendorong terjadinya konflik. Menurut Max Weber, hubungan sosial dikatakan sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada ditujukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Konflik dapat dikatakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Banyak hal yang dapat melatar belakangi terjadinya konflik, misalnya perbedaan kepentingan antar kelompok. Louis Kriesberg menyatakan bahwa konflik merupakan situasi yang dimana dua atau lebih aktor mengejar tujuan – tujuan yang tidak saling sesuai mengenai sebuah objek tertentu (Bakry, 2017:68).

Dalam hubungan internasional, konflik merupakan suatu kajian atau bahasan yang sangat panjang dengan batasan yang tak terhingga. Hal ini disebabkan akan terulang kembali perspektif sejarah yang telah dilalui oleh

umat manusia. Graham Evans dan Jeffrey Newnham menyatakan bahwa konflik merupakan kondisi dimana dua aktor atau lebih mengejar tujuan yang sama dan saling bertentangan. (Bakry, 20:69). Konflik itu sendiri dapat bermula dari perselisihan hingga terjadinya perang.

Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua, yaitu :

1. *Zero Sum Game* (konflik menang-kalah), merupakan konflik yang bersifat antagonistik, sehingga tidak memungkinkan adanya kompromi maupun kerjasama antar pihak yang terlibat dalam konflik.
2. *Non Zero Sum Game* (konflik menang-menang), merupakan situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih memungkinkan untuk melakukan kompromi dan kerjasama.

Konflik dapat meliputi tindakan ancaman, kekerasan, dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda atau militer. Konflik dapat meliputi krisis, perselisihan maupun persaingan. Unsur utama konflik adalah dimana suatu gerak oleh suatu negara dalam suatu isu dianggap sebagai kerugian atau ancaman bagi pihak lain. Selain itu, antar negara dapat saling bersaing satu sama lain dalam pemenuhan kepentingannya tapi tidak menyadari keberadaan dari lawan tersebut yang dimana persaingan tersebut akan menuju kepada konflik. Dimana dalam mencapai kepentingannya melakukan berbagai cara untuk menggagalkan lawan

dalam mencapai kepentingannya atau bahkan menghancurkan lawan itu sendiri.

Sebab-sebab terjadinya konflik diantaranya adalah konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi. Isu yang mengemuka adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. Kemudian, teori bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain. Terdapat dua tipe konflik internasional:

1. Konflik internal yang memiliki dimensi internasional.

Dalam konflik internal negara – negara tetangga dapat terlibat dalam penyelesaiannya. Bukan hanya itu, masyarakat sendiri dapat meminta bantuan pihak luar baik organisasi internasional ataupun negara lain dalam membantu penyelesaian konflik internal. Faktor yang menjadi konflik internal yaitu politik, ekonomi, sosial, keamanan negara, geografi dan budaya.

2. Konflik antar-negara

Permasalahan yang sering terjadi antar negara dikarenakan perbedaan tuntutan antara negara satu dengan lainnya. Masalah yang sering terjadi antar negara yaitu wilayah teritorial baik itu mempertahankan wilayahnya ataupun menyatakan wilayah tersebut sebagai bagian dari kepemilikan negara, tindakan diplomatik, adanya propaganda, sanksi militer dan adanya ancaman dari negara lain.

Konflik itu sendiri dapat berlanjut dalam beberapa dekade dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan dikarenakan tindakan yang datang secara tiba – tiba. Tidak diharapkan oleh suatu negara, dapat meningkatkan ketegangan dan ancaman bagi pihak lawan. Sehingga kondisi tersebut memaksa pihak lawan harus membuat keputusan dalam mengatasi konflik tersebut.

Dalam kasus konflik Ukraina yang dimana Rusia terlibat didalamnya, meliputi tindakan ancaman dan kekerasan yang menggunakan kekuatan militer dan adanya peran non-aktor. Konflik tersebut termasuk kepada konflik *Zero Sum Game* dan konflik antar negara, dimana antara Ukraina dan Rusia harus ada yang menang dan kalah, karena dilihat dari adanya kepentingan dan tuntutan yang sulit untuk diselesaikan dengan cara damai atau mengalah.

#### **2.1.4 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan domestik demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga, kepentingan nasional sangat penting dan vital bagi suatu negara. Menurut Hans J Morgenthau adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultural dari gangguan negara lainnya dan juga untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan negaranya saat itu dari negara lain. Pemimpin negara menentukan kebijakan terhadap negara lain atau merupakan kekuatan yang menjadi pilar utama dalam bidang

politik nasional maupun internasional yang realistis dan dipenuhi suatu pertentangan untuk menanamkan pengaruhnya di suatu kawasan. Rosenau menjelaskan bahwa kepentingan nasional digunakan sebagai alat politik dan juga berfungsi sebagai sarana untuk membuat kebijakan dalam menentukan yang terbaik bagi negaranya dalam urusan luar negeri (Rosenau, 2006:46).

Dengan cara ini, konsep kepentingan nasional yang dikejar oleh para pemimpin yaitu memaksakan tindakan disiplin pada pejabat luar negeri untuk memastikan bahwa kepentingan yang akan dicapai dengan kekuatan yang dimiliki relatif terhadap negara lain. Morgenthau mengakui bahwa ada kendala dalam perebutan kekuasaan di antara negara-negara dibandingkan dengan politik domestik. Ini adalah salah satu alasan mengapa Morgenthau mendesak para pejabat luar negeri untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) (Baylis, 2020:137).

Kepentingan nasional menjadi sangat berpengaruh bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan politik, sosial, maupun ekonomi dan untuk pertahanan keamanan. Secara umum negara yang membawa kepentingan nasionalnya cenderung melakukan intervensi terhadap suatu kawasan. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Kepentingan nasional sangat berkaitan erat dengan *power*, yang dimana suatu negara menggunakan *power* sebagai instrumen dalam mencapai kepentingannya.

Kepentingan nasional dapat bersifat objektif ataupun subjektif. Kepentingan nasional menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan luar

negeri suatu negara. Sehingga, politik luar negeri suatu negara dapat dilihat dari kepentingan nasional negara itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional dapat dipertimbangkan dilihat dari tindakan dan keputusan ideologi dan identitas suatu negara. Dalam menentukan kepentingan nasionalnya, suatu negara akan melihat dari berbagai faktor dan dalam jangka waktu yang akan ditentukan apakah untuk waktu dekat atau untuk jangka panjang. Dalam merumuskan kepentingan nasionalnya, akan dilihat dari sistem pemerintahan ataupun sejarah dari negara itu sendiri.

Dalam kepentingan nasional terdapat pembeda dalam pemenuhannya yaitu kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital adalah kepentingan yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut, sehingga negara akan melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kepentingan vital tersebut. Sedangkan, kepentingan sekunder adalah kepentingan yang ingin dicapai oleh negara itu sendiri dan tidak berkaitan secara langsung dengan eksistensi negara tersebut.

Dalam penentuan skala prioritas kepentingan yang akan dicapai, akan dirumuskan dalam suatu kebijakan luar negeri yang disusun melalui strategi. Keadaan global yang selalu berubah membuat kebijakan luar negeri itu sendiri perlu disesuaikan dengan perkembangan – perkembangan yang ada agar dapat menyesuaikan dengan keadaan negara – negara lain dan kondisi global.

Menurut Holsti tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara memiliki tujuan untuk keamanan, otonomi, kesejahteraan dan *prestise*. Kepentingan yang relatif sama diantara semua negara akan selalu berkaitan erat dengan kemandirian dan kesejahteraan. Kedua hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kepentingan nasional dengan bertemunya kepentingan negara yang berbeda, maka terciptalah hubungan baik berupa konflik maupun kerjasama.

Kepentingan nasional Rusia di Ukraina melihat bahwa negara Ukraina merupakan negara yang cukup penting bagi Ukraina. Dimana adanya pangkalan militer di bagian wilayah Ukraina. Selain itu, Rusia ingin menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan global di kawasan Eropa Timur.

### **2.1.5 Strategi**

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “strategus” yang diartikan sebagai “*the art of general*”. Strategi muncul sebagai konsep selama abad ke-18 dan 19, ketika para praktisi secara sistematis mengumpulkan pemikiran mereka tentang bagaimana perang harus secara efektif dilawan. Kemudian, perkembangan strategi itu sendiri terjadi sejak peristiwa perang dingin serta perkembangan sistem internasional dan keamanan lingkungan.

Sun Tzu dalam bukunya *Art of War* menggunakan strategi militer dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada untuk mengalahkan musuh. Untuk menghindari perang menurut Sun Tzu dapat dilakukan dengan

menggunakan strategi yang diperoleh dari kekuatan militer yang ada. Strategi dalam perang tidak hanya dititikberatkan pada kekuatan militer saja, akan tetapi juga dari kemampuan intelektual seorang dalam menentukan keberhasilan perang, selain itu bagaimana dapat menundukkan lawan tanpa harus melakukan perang dan adanya pertumbuhan darah.

Menurut Marskal Sokolovsky dalam bukunya *Military Strategy*, strategi merupakan seni dalam memimpin. Dapat dikatakan menentukan strategi jangka panjang berdasarkan metode atau cara gunanya (taktik). Dengan situasi internasional yang dapat dikatakan anarki, membuat strategi menjadi lebih relevan dengan keamanan negara karena strategi digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Apabila situasi internasional akan terus bersifat anarki maka menggunakan kekuatan militer akan menjadi dibenarkan oleh negara.

John P. Lovell menyatakan bahwa strategi merupakan serangkaian langkah – langkah atau keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif yang dimana hasil akhirnya tidak semata – mata bersifat keuntungan. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan dengan menggunakan *power* termasuk juga kekuatan militer (Triwahyuni & Wulandari, 2016:109). Strategi menurut Colin S. Gray dapat didefinisikan sebagai “teori dari praktek penggunaan dan atau ancaman penggunaan kekuatan yang terorganisis untuk tujuan politis”. Kajian strategi sendiri dapat melibatkan politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, geografi dan teknologi. (Burhanuddin, 2017:7).



Di dunia barat dalam kajian strategi terdapat *Grand Strategy* dan *Tactics*. *Grand Strategy* adalah perencanaan jangka panjang yang kompleks karena berfikir kepada tujuan jangka panjang. Selain itu, merupakan langkah selanjutnya dalam berfikir di luar strategi militer yang dibangun berdasarkan gagasan yang telah berhasil melaksanakan suatu strategi militer, dimana memerlukan penguasaan sumber daya negara yang cermat, mobilisasi masyarakat, dan diplomasi. Ini menyiratkan bahwa strategi besar melampaui masa perang ke masa damai dan harus mencakup pencegahan perang.

Istilah *grand strategy* secara resmi diperkenalkan oleh Liddell Hart yang menekankan bahwa *grand strategy* lebih dari sekedar memenangkan perang tetapi juga sampai kepada kondisi yang mencapai keadaan damai dan lebih baik setelah perang daripada sebelumnya (Howard, 2001:1). Berbeda dengan strategi, taktik adalah teknik yang digunakan oleh pihak militer untuk melawan angkatan bersenjata dari pihak lawan dan untuk memenangkan pertempuran (Baylis, 2020:227).

Richard K. Betts mendefinisikan strategis ke dalam 3 bagian. Pertama adalah *military science* yang menggabungkan teknologi, organisasi dan taktik untuk memenangkan perang. Kedua, *security studies* bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan masyarakat. Ketiga, *mutual interaction of political goals and military assets influenced by social, economic and other limitation*, artinya adalah keterbatasan sosial,

ekonomi dan lainnya, memberikan pengaruh terhadap hubungan interaksi antara tujuan politik dan militer (Hidayat, 2017:16).

Subjek dari strategi itu sendiri adalah berpikir tentang tujuan yang akan ditempuh dalam perang, perencanaan dan persiapan. Para pemimpin politik dan militer berusaha menjadikan perang sebagai instrumen dan sarana untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Dimana para pemimpin berpikir secara strategis dengan menghubungkan tujuan-tujuan perang, seperti mempertahankan wilayah, mengambil sebagian wilayah lawan, mendapatkan kemerdekaan atau mengejar tujuan ideologi. Akan tetapi, bagi pihak yang lemah, untuk menghadapi pihak yang kuat, mereka menggunakan *indirect strategy*. *Indirect strategy* merupakan strategi yang dilakukan dengan melakukan perang jejaring kecil di banyak tempat dengan waktu yang berbeda (Hadi, 2007:30).

Strategi yang ditentukan oleh Rusia adalah dengan menggunakan metode *hybrid warfare*. Dimana dengan strategi tersebut, Rusia dapat menentukan pola dan alur dengan tidak terfokus kepada satu kekuatan dan aktor tertentu saja. Sehingga, Rusia dapat melakukan upaya untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya di Ukraina.

#### **2.1.6 *Hybrid warfare***

Istilah perang hibrida adalah susunan untuk menganalisis konflik yang melibatkan pasukan militer dan non-militer yang terlibat dalam pertempuran simetris dan pertempuran asimetris. Namun, pada abad ke-21

bentuk perang berubah menjadi bentuk-bentuk yang tampaknya asing, dimana menggabungkan kekuatan non-militer dan tidak pada medan perang yang sama. Perang di abad ke-21 telah mengalami perubahan dan merupakan fenomena yang kompleks tetapi esesinnya tidak akan pernah berubah.

Perang hibrida didefinisikan sebagai konflik yang melibatkan kombinasi pasukan militer konvensional dan non-konvensional yang dapat mencakup aktor negara dan non-negara dengan kepentingan mencapai tujuan politik. Perang hibrida juga mempersiapkan taktis, operasional, hingga strategis. Keberadaan kekuatan konvensional membutuhkan kekuatan militer untuk melawan musuh. Dengan kata lain, keberhasilan militer harus mengarah pada hasil politik yang sepadan seperti yang dirasakan oleh orang – orang yang terkena dampak dan kekuatan militer hanya akan bermanfaat bagi yang kuat. (Murray & Mansoor, 2012:2)

T. E. Lawrence dan Mao Zedong menulis tentang cara terbaik untuk melancarkan operasi militer melawan musuh yang lebih kuat. Karenanya, untuk pihak yang lebih lemah, taktik yang berkembang secara bertahap lebih halus dan tidak langsung adalah tepat. Taktik-taktik ini termasuk menggunakan propaganda untuk memobilisasi dukungan bagi para pemberontak dan untuk menurunkan mental pasukan musuh serta menyerang titik-titik lemah militer lawan. (Lanzoka, 2016:177)

Russell Glenn mengutip definisi tentang ancaman hibrida sebagai musuh yang secara serentak mudah menyesuaikan dirinya dengan

menggunakan gabungan yang disesuaikan dari cara atau kegiatan konvensional, tidak teratur, adanya terorisme dan dapat dilakukan di ruang pertempuran operasional. Ancaman hibrida dapat terdiri dari kombinasi aktor negara dan non-negara.

Williamson Murray dan Peter R. Mansoor mendefinisikan perang hibrida sebagai:

“Sebuah konflik yang melibatkan kombinasi pasukan militer konvensional dan laskar (gerilyawan, pemberontak, dan teroris), yang dapat mencakup aktor negara dan non-negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik bersama.” (Murray & Mansoor, 2012:3.).

Perang Hibrida didefinisikan oleh Frank Hoffman sebagai gabungan dari mematikan konflik negara dengan semangat fanatik dan perang berkepanjangan yang tidak teratur (Hoffman, 2007:38.) Perang hibrida itu sendiri bukanlah konsep baru, tetapi teknologi yang digunakan menginspirasi tantangan baru. (Hunter & Pernik, 2015:3) Antulio J. Echevarria berpendapat bahwa konsep strategis baru dapat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan terhadap tantangan keamanan yang muncul. Namun, ketika strategi baru tersebut semakin populer akan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi klaim tentang perang kontemporer yang tidak didukung oleh analisis strategis dan dapat menjadi kontraproduktif dengan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dalam jangka panjang (Renz, 2015:16).

Rusia dalam mencapai kepentingannya di Ukraina menggunakan metode *hybrid warfare* yang dimana tidak hanya menggunakan kekuatan militer saja, tetapi juga non-militer dan adanya keterlibatan non-aktor. Rusia memanfaatkan masyarakat Ukraina yang pro-Rusia dan adanya pemberian senjata dan uang sehingga adanya pihak oposisi di dalam Ukraina itu sendiri.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya teori – teori mampu mendukung untuk setiap penelitian ataupun permasalahan yang sedang ada dan menuju kepada pembahasan sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Melalui kepentingan nasional tersebut setiap negara melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuannya. Rusia memiliki kepentingannya di Ukraina salah satunya ingin menyebarkan pengaruhnya, selain itu juga adanya armada laut hitam Rusia di Sevastopol. Dalam mencapai kepentingannya, Rusia melakukan strategi yang dimana strategi yang digunakan adalah menggunakan *hybrid warfare* dengan menggabungkan kekuatan militer dan non-militer, selain itu juga adanya keterlibatan non-aktor dalam penggunaan metode *hybrid warfare* tersebut. Dengan penggunaan *hybrid warfare*, Rusia telah berhasil melakukan aneksasi Krimea yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah Ukraina.

Selain itu, Rusia membantu masyarakat pro-Rusia yang berada di wilayah Ukraina Timur dalam melakukan tindakan separatis yang terjadi di daerah

Donetsk dan Luhansk. Dimana strategi *hybrid warfare* yang digunakan oleh Rusia adalah dengan adanya gerakan separatis yang dimana para pemberontak atau oposisi didukung oleh Rusia dari pemberian uang dan senjata, sehingga mendesak pemerintah Ukraina dalam membuat suatu keputusan. Dengan strategi yang digunakan Rusia telah berhasil memicu konflik di Ukraina baik permasalahan internal dan eksternal, yang mana telah mengganggu kestabilan politik dan keamanan di Ukraina itu sendiri, sehingga keamanan domestik Ukraina terancam. Dari strategi yang digunakan dan menimbulkan adanya konflik memberikan dampak yang berpengaruh terhadap kondisi dan situasi kedua negara tersebut, bagaimana hubungan kedua negara dan kondisi domestik kedua negara khususnya Ukraina. Akan tetapi, strategi tersebut membuat Rusia dapat mencapai kepentingan nasionalnya yang salah satu diantaranya yaitu mempertahankan pengaruhnya di Ukraina dan mempertahankan armada laut hitam yang ada di Semenanjung Krimea.

